

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- A.A. Andi Prajitno *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan siapa notaris di Indonesia*, Selaras, Malang, 2013.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, 2003.
- H. Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Habib Adjie, SH., *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Habib Adjie, SH., *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Habid Adjie, SH., *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, 2005.
- Komar Andasmita, *Notaris 1*, Sumur Bandung, Bandung, 1984.
- Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Tugas, Kewajiban, dan Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, 2000.
- Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, Jakarta, 2013.
- Pieter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- R. Wijono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Siti Soemarti, S.H, *Pengantar Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran*, cetakan kedua, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Jogjakarta, 1993.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hovie, Jakarta, 2007.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 )
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH – 06. AH. 02.10 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.